

KINERJA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN VOLATILITAS HARGA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ridwan Apriansyah^{1*}, Harianto², Achmad Suryana²

¹ Program Magister Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia

² Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Penulis Korespondensi: ridwanapriansyah@apps.ipb.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 29 Mei 2026</i> <i>Revised: 02 Juni 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi gangguan pasokan di tingkat daerah. Beras sebagai komoditas pangan pokok utama memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga ketersediaan yang memadai perlu dijaga melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD). Namun demikian, volume CBPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja CBPD dalam meredam volatilitas harga beras di Provinsi NTB dan menganalisis volatilitas harga beras antara Provinsi NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jakarta sebagai provinsi pembanding. Penelitian dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Data yang digunakan meliputi cadangan beras, produksi beras, dan harga beras premium maupun medium bulanan periode 2023-2025. Analisis data kinerja CBPD dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan CBPD yang berpedoman pada Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025, sedangkan volatilitas harga beras dianalisis menggunakan <i>Coefficient of Variation</i> (CV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi kinerja CBPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB tahun 2023-2025 belum memenuhi standar kebutuhan, volatilitas harga beras di Provinsi NTB mengalami penurunan selama periode 2023-2025 pada beras premium dan medium, dan pola penurunan volatilitas juga terjadi di provinsi pembanding meskipun dengan tingkat yang berbeda antarwilayah. Berdasarkan temuan tersebut, kepada pemerintah daerah di Provinsi NTB direkomendasikan meningkatkan volume CBPD dan kualitas pengelolaannya sesuai pedoman dari Bapanas untuk menjaga keberlanjutan penurunan volatilitas harga beras di Provinsi NTB.
Keywords <i>Efektivitas;</i> <i>Cadangan Beras</i> <i>Pemerintah Daerah;</i> <i>Volatilitas Harga Beras;</i> <i>Provinsi Nusa Tenggara Barat;</i> <i>Analisis Komparatif;</i>	

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan pangan yang memadai, aman, bergizi, dan mudah diakses berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, sektor pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai fondasi dalam penguatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas nasional (Suryana 2014).

Pentingnya penyelenggaraan pangan tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini menempatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagai prinsip utama dalam pembangunan pangan nasional. Salah satu kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan perlunya mengembangkan kebijakan cadangan pangan nasional yang mencakup cadangan pangan pemerintah pusat (CPPP),

cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), serta cadangan pangan masyarakat (CPM) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pangan nasional (UU No. 18 Tahun 2012; PSEKP 2021).

Di antara berbagai komoditas pangan strategis, beras memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pangan nasional Indonesia. Sebagai bahan pangan utama bagi mayoritas masyarakat, keberadaan beras tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Lebih jauh, pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa kestabilan pasokan dan harga beras sering dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat (Suryana 2008).

Dalam perspektif teori persediaan, stok pangan yang dikelola pemerintah berfungsi sebagai instrumen pengelolaan pasokan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan komoditas. Cadangan tersebut berperan sebagai *buffer stock* yang dapat dilepas ke pasar guna meredam gejolak dan menstabilkan harga (Dalheimer *et al.* 2026). Namun demikian, implementasi pembentukan cadangan pangan di setiap daerah menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah, ketersediaan infrastruktur penyimpanan, serta efektivitas tata kelola cadangan pangan yang diterapkan di masing-masing wilayah (Utami *et al.* 2023).

Dalam sistem perberasan nasional, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk ke dalam 10 provinsi sentra produksi di Indonesia. Sebagai provinsi surplus beras, NTB memiliki posisi strategis yang mampu memasok kebutuhan wilayah lain. Sementara itu, NTB juga sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi beras per kapita yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan NTB memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan, baik pada tingkat regional maupun nasional. Stabilitas pasokan dan harga beras di daerah surplus seperti NTB menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan distribusi pangan antardaerah serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Pada periode 2023-2025, Pemerintah Provinsi NTB telah mengembangkan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai salah satu instrumen kebijakan pangan daerah. Keberadaan CBPD diarahkan untuk mengurangi risiko gejolak pasokan akibat pola panen musiman dan dampak perubahan iklim serta menekan volatilitas harga beras yang dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan beras di masyarakat. Namun demikian, volume CBPD yang tersedia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total produksi beras daerah. Pada tahun 2023, jumlah CBPD tercatat sebesar 56,30 ton atau sekitar 0,006% dari total produksi beras sebesar 876.274 ton. Selanjutnya, pada tahun 2024 volume CBPD meningkat menjadi 104,40 ton atau sekitar 0,013% dari produksi beras sebesar 827.788 ton. Adapun pada tahun 2025, jumlah CBPD kembali menurun menjadi 82,48 ton atau sekitar 0,008% dari total produksi beras sebesar 973.145 ton (NTB Satu Data 2025; BPS Provinsi NTB 2026).

Besaran CBPD tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Bapanas 2025). Rendahnya proporsi CBPD terhadap total produksi beras menunjukkan bahwa kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah di Provinsi

NTB masih belum dapat berperan optimal dalam menjalankan fungsi stabilisasi pasar. Kondisi ini berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam meredam volatilitas harga beras yang dapat muncul akibat gangguan produksi, distribusi, maupun ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Padahal, pada wilayah surplus pangan seperti NTB, keberadaan CBPD seharusnya mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga kestabilan harga dan mengurangi risiko gejolak pasar pangan. Oleh karena itu, kinerja CBPD di provinsi NTB dalam meredam volatilitas harga beras perlu dianalisis secara lebih mendalam. Selain itu, analisis komparatif dengan provinsi pembanding menjadi penting guna memperoleh gambaran mengenai kondisi volatilitas harga beras pada wilayah dengan kapasitas cadangan pangan dan karakteristik wilayah yang berbeda.

Sementara itu, Provinsi NTB memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap gangguan produksi padi akibat perubahan iklim dan bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesinambungan pasokan beras serta memicu terjadinya volatilitas harga pangan di daerah. Oleh karena itu, ketersediaan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) dalam jumlah yang memadai serta pengelolaan yang efektif menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi volatilitas harga beras di Provinsi NTB, mengingat beras merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang kuat.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara cadangan pangan pemerintah dan stabilitas harga beras, sebagian besar penelitian lebih banyak difokuskan pada skala nasional serta peran cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola pemerintah pusat. Sementara itu, kajian mengenai kinerja CBPD dalam meredam volatilitas harga beras di tingkat daerah masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah surplus beras di Indonesia bagian timur seperti Provinsi NTB. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya juga belum mengaitkan analisis volatilitas harga beras dengan pengelolaan cadangan serta perbandingan volatilitas harga antar provinsi yang memiliki karakteristik produksi dan ketahanan pangan yang berbeda. Sehubungan dengan itu, kebaruan penelitian ini adalah mengenai analisis kinerja pengelolaan CBPD dalam meredam volatilitas harga beras di tingkat daerah serta perbandingan volatilitas harga antar provinsi dengan karakteristik produksi dan ketahanan pangan yang berbeda.

Berdasarkan kondisi yang sudah di jelaskan sebelumnya, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaan pengelolaan CBPD dalam meredam volatilitas harga beras di Provinsi NTB serta membandingkan volatilitas harga beras di Provinsi NTB dengan beberapa provinsi pembanding, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan Jakarta. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan cadangan pangan daerah dalam menjaga stabilitas harga beras pada wilayah dengan karakteristik produksi dan ketahanan pangan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2026 dengan cakupan wilayah di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB). Tahapan penelitian mencakup kegiatan pengunduhan data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data menggunakan metode regulatif pada level provinsi dan kabupaten/kota, serta koefisien variasi pada level provinsi. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan pertimbangan bahwa NTB merupakan salah satu daerah penghasil beras yang memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia bagian timur. Namun demikian, daerah ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD). Di samping itu, meskipun Provinsi NTB menunjukkan kondisi surplus produksi beras, namun kapasitas cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih relatif terbatas dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data kuantitatif bulanan yang mencakup periode tahun 2023-2025 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun data yang digunakan berupa kebutuhan CBPD, realisasi CBPD, produksi beras, harga beras premium dan medium. Seluruh data digunakan untuk mendukung analisis mengenai kinerja cadangan pangan pemerintah daerah dalam meredam volatilitas harga beras di Provinsi NTB dan perbandingan volatilitas harga dengan daerah pembanding.

Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, BPS Provinsi NTB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dan data panel harga pangan harian yang dipublikasikan oleh Bapanas. Untuk memperkuat interpretasi hasil analisis, penelitian ini juga memanfaatkan kajian pustaka yang bersumber dari berbagai publikasi ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Peraturan Bapanas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Besarnya kebutuhan CBPD dihitung berdasarkan pedoman pada Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025. Dalam regulasi ini ditetapkan metode perhitungan kebutuhan CBPD di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan lima variabel, yaitu wilayah terdampak bencana, prevalensi kerawanan pangan, indeks kerawanan bencana, jumlah penduduk, dan konsumsi per kapita. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen teknis dan sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah. Selain menganalisis kinerja CBPD di Provinsi NTB, penelitian ini juga akan menganalisis CBPD yang dikelola oleh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, dengan data yang bersumber dari Dinas Ketahanan Provinsi NTB. Dengan demikian, perhitungan CBPD di rumuskan sebagai berikut:

Tahapan pertama

$$DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K]$$

Dimana DDCBD adalah Data Dasar Cadangan Beras Daerah. DDCBD diperoleh dari total jumlah Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), dan cadangan Beras Masyarakat (CPM) di satu wilayah provinsi. Selanjutnya, % WTB adalah persentase wilayah terdampak bencana, %

PKP adalah persentase prevalensi kerawanan pangan, IRBI adalah indeks kerawanan bencana, Pop adalah jumlah penduduk, dan K adalah tingkat konsumsi beras perkapita pertahun.

Tahapan kedua

$$CBD = 0,5\% \times DDCBD$$

Dimana CBD adalah Cadangan Beras Daerah. CBD sebesar 0,5% dari total DDCBD. Penentuan persentase ini dirancang agar cadangan pangan beras tersedia saat di perlukan untuk mengatasi kerentanan pangan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Tahapan Ketiga

$$CBPP = 20\% \times CBD$$

Dimana CBPP adalah Cadangan Beras Pemerintah provinsi. CBPP ditetapkan sebesar 20% dari CBD

Tahapan Keempat

CBPK

$$CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% \times CBD$$

$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

$$(P) \text{ Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

Dimana CBPK adalah Cadangan Beras Pemerintah kabupaten/kota. CBPK dihitung berdasarkan rata-rata realisasi APBD dan proporsi produksi beras daerah terhadap provinsi, kemudian dikalikan 75% dari CBD.

Lebih lanjut, analisis volatilitas harga beras di Provinsi NTB dan provinsi pembanding menggunakan koefisien variasi (*Coefficient of Variation/CV*). Analisis ini merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat fluktuasi harga beras yang terjadi di pasar pangan. Tingginya volatilitas harga menunjukkan adanya ketidakpastian pergerakan harga yang dapat berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat maupun kinerja pengelolaan CBPD.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation/CV*) yang diolah dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2021. Dalam penelitian ini selain menghitung CV harga beras di lokasi penelitian (Provinsi NTB), juga sebagai perbandingan dihitung CV untuk harga beras di Provinsi Jakarta (referensi nasional), Provinsi Jawa Timur (referensi pusat perekonomian di Jawa bagian timur yang memengaruhi perekonomian di wilayah timur Indonesia), dan Provinsi NTT (referensi provinsi tetangga yang mengalami defisit produksi terhadap kebutuhan konsumsi beras).

Analisis CV di Provinsi NTB dan provinsi pembanding bersumber dari data panel harga pangan nasional yang dipublikasikan secara bulanan oleh Bapanas pada periode 2023–2025. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

Dengan keterangan:

CV = *Coefficient of Variation*

S = Standar deviasi harga beras selama periode pengamatan

\bar{x} = Rata-rata harga beras pada periode yang sama

CV dipilih karena ukuran tersebut mampu memberikan gambaran tentang tingkat fluktuasi relatif harga terhadap rata-rata bahkan memungkinkan perbandingan antar wilayah meskipun harga beras di setiap pasar memiliki tingkat harga rata-rata yang berbeda. Huchet-Bourdon (2011) menegaskan bahwa pengukuran volatilitas dengan CV efektif untuk memahami dinamika harga komoditas pertanian dan relevan untuk membandingkan kestabilan harga antar wilayah. Semakin rendah nilai CV, maka fluktuasi harga relatif semakin stabil. Sebaliknya apabila semakin tinggi nilai CV, maka harga cenderung lebih bergejolak. Kajian empiris di Indonesia menunjukkan adanya variasi volatilitas harga antarwilayah. Muslimin (2015) menemukan bahwa harga beras di Jakarta dan Surabaya berfluktuasi signifikan terutama pada periode krisis ekonomi, meskipun relatif dapat dikendalikan melalui intervensi BULOG. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam menentukan tingkat volatilitas harga antar wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja CBPD di Provinsi NTB

Kinerja CBPD di Provinsi NTB dianalisis dan dihitung berdasarkan kebutuhan CBPD yang tercantum dalam Peraturan Bapanas Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut menerapkan sejumlah pendekatan berbasis risiko, yaitu persentase wilayah terdampak bencana (% WTB), persentase prevalensi kerawanan pangan (% PKP), indeks kerawanan bencana (IRBI), jumlah penduduk (Pop), serta tingkat konsumsi beras per kapita per tahun (K). Dengan pendekatan tersebut, besaran kebutuhan CBPD tidak hanya ditentukan oleh dinamika kependudukan, seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi kerawanan pangan dan risiko kebencanaan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Hitungan berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025; bahwa pada tahun 2023, kebutuhan CBPD provinsi sebesar 265,95 ton dengan realisasi sebesar 56,88 ton, terhadap produksi sebesar 876.274 ton. Pada tahun 2024, CBPD provinsi sebesar 258,55 ton dengan realisasi sebesar 104,40 ton, terhadap produksi sebesar 827.788 ton. Selanjutnya pada tahun 2025, kebutuhan CBPD provinsi sebesar 140,38 ton dengan realisasi sebesar 82,48 ton terhadap produksi sebesar 973.145 ton. Sesuai Peraturan Bapanas tersebut, kabupaten/kota juga diarahkan untuk mengembangkan CBPD. Kebutuhan dan realisasi CBPD terhadap kebutuhan pada 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2023-2025 berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kebutuhan dan realisasi CBPD terhadap produksi pada 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2023-2025, berdasarkan Peraturan Bapanas No 3 Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (ton)	Kebutuhan (ton)	Realisasi (ton)
2023				
1	Kota Bima	7.502	28,63	8,42
2	Kota Mataram	9.317	52,03	10
3	Kab. Bima	126.436	117,75	0
4	Kab. Dompu	53.754	76,12	2
5	Kab. Sumbawa	183.039	157,87	15,14
6	Kab. Sumbawa Barat	40.365	60,87	30,72
7	Kab. Lombok Utara	18.767	39,20	49,31
8	Kab. Lombok Timur	141.971	170,02	24,2
9	Kab. Lombok Tengah	216.891	194,97	72,07
10	Kab. Lombok Barat	78.232	99,85	0,57
2024				
1	Kota Bima	7.177	27,97	10,69
2	Kota Mataram	8.810	46,64	1,27
3	Kab. Bima	116.579	124,45	0
4	Kab. Dompu	57.880	59,85	3,26
5	Kab. Sumbawa	168.479	159,82	4,53
6	Kab. Sumbawa Barat	29.421	64,70	30,72
7	Kab. Lombok Utara	21.015	42,20	31,03
8	Kab. Lombok Timur	144.832	166,47	23,43
9	Kab. Lombok Tengah	203.616	179,33	75,46
10	Kab. Lombok Barat	69.979	98,14	5,62
2025				
1	Kota Bima	7.686	13,99	15
2	Kota Mataram	9.799	27,17	20
3	Kab. Bima	117.397	60,92	2,86
4	Kab. Dompu	87.768	34,45	6,05
5	Kab. Sumbawa	229.968	84,05	15,37
6	Kab. Sumbawa Barat	43.642	33,50	28,42
7	Kab. Lombok Utara	19.130	22,33	52,18
8	Kab. Lombok Timur	137.327	92,76	23,53
9	Kab. Lombok Tengah	241.791	103,89	77,62
10	Kab. Lombok Barat	78.637	53,36	69,79

Berdasarkan Peraturan Bapanas No 3 Tahun 2025, seperti disajikan dalam Tabel 1, kebutuhan dan realisasi CBPD di masing-masing kabupaten/kota memiliki variasi yang cukup besar, yang mencerminkan perbedaan kapasitas produksi beras dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan CBPD.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, pada tahun 2023, enam daerah telah mengembangkan CBPD, yaitu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur, dan Kota Bima, walaupun masih di bawah ketetapan Bapanas. Sementara itu, empat daerah lainnya yaitu Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten

Lombok Barat belum sungguh-sungguh mengembangkannya, bahkan Kabupaten Bima belum memiliki CBPD sama sekali. Pada tahun 2024 pengembangan CBPD di kabupaten/kota tersebut membaik, kecuali Kabupaten Bima yang masih belum memilikinya. Pada tahun 2025, semua kabupaten/kota di NTB sudah memiliki CBPD walaupun proporsinya terhadap kebutuhan di masing-masing daerah sama tidak sama.

Pada tahun 2025, produksi beras di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 241.791 ton, memiliki kebutuhan CBPD tertinggi, yaitu sebesar 103,89 ton dengan realisasi sebesar 77,62 ton (74,71%). Tingginya kebutuhan CBPD di daerah ini sejalan dengan besarnya produksi beras yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Selanjutnya, Kota Bima dengan produksi beras sebesar 7.686 ton memiliki kebutuhan CBPD dalam proporsi menengah, yaitu sebesar 13,99 ton dengan realisasi sebesar 15 ton, sudah melebihi kebutuhan (107,22%). Sementara itu, Kabupaten Bima masih menjadi salah satu daerah dengan realisasi CBPD yang sangat rendah, ditunjukkan oleh kebutuhan sebesar 60,92 ton, namun realisasi hanya sebesar 2,86 ton (4,69%), meskipun produksi berasnya mencapai 117.397 ton.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan pada realisasi CBPD di Provinsi NTB menunjukkan keselarasan secara substantif dengan kebijakan pangan nasional. Namun, pelaksanaannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat (Bapanas). Pada tahun 2023-2025, realisasi CBPD di Provinsi NTB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di bawah kebutuhan yang ditetapkan dalam Perbadan No.3 Tahun 2025. Akan tetapi, pemanfaatan CBPD tetap dilakukan sesuai amanat regulasi daerah masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adanya hal tersebut, maka pelaksanaannya sesuai dengan konsep *buffer stock* di tingkat lokal sebagaimana diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Volatilitas Harga Beras di Provinsi NTB

Melalui analisis perhitung *Coefficient of Variation* (CV), volatilitas atau stabilitas harga beras di Provinsi NTB harga antar waktu dapat dinilai melalui tingkat volatilitas harga beras yang mengacu pada kriteria Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2021), yaitu harga beras stabil apabila nilai CV <10%. Pendekatan analisis dengan nilai CV ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengetahui kemampuan sistem pasar dan kinerja CBPD dalam mengurangi atau meredam volatilitas harga. Nilai CV harga beras premium dan medium di Provinsi NTB selama periode 2023-2025 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 *Coefficient of Variation* (CV) Harga Beras premium dan Medium di Provinsi NTB 2023-2025

No.	Tahun	Beras Premium (%)	Beras Medium (%)
1	2023	9,41	8,32
2	2024	4,26	3,08
3	2025	1,32	1,51

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 di Provinsi NTB, volatilitas harga beras premium berada pada kategori tinggi dengan nilai CV sebesar 9,42% dan beras medium berada

pada kategori sedang dengan nilai CV sebesar 8,31%, masuk ke dalam kriteria stabil. Volatilitas tersebut terjadi walaupun produksi beras di Provinsi NTB meningkat dari 827,52 ribu ton pada tahun 2022 menjadi 876,27 ribu ton pada tahun 2023, namun mengindikasikan bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh dinamika pasokan nasional daripada produksi daerah. Pada saat yang sama, impor beras nasional sebesar 3.152.911 ton sebagai respons terhadap tekanan pasokan di tingkat nasional yang turut mempengaruhi ekspektasi dan transmisi harga termasuk di Provinsi NTB. Selain dari pada itu, realisasi CBPD Provinsi NTB pada tahun 2023 sebesar 56,88 ton relatif kecil dibandingkan skala produksi daerah, sehingga kondisi yang terjadi belum optimal sebagai penyangga daerah, meskipun di dukung oleh CBPD di 10 Kabupaten/kota di Provinsi NTB. Temuan ini sejalan dengan Wright (2011), menyatakan bahwa volatilitas meningkat ketika cadangan relatif terbatas terhadap ukuran pasar dan ketidakpastian pasokan, sehingga kemampuan stabilisasi menjadi lemah.

Pada tahun 2024, volatilitas harga beras menurun secara signifikan di Provinsi NTB. Volatilitas harga beras premium berada pada kategori stabil dengan nilai CV sebesar 5,42% dan harga beras medium berada pada kategori ringan dengan nilai koefisien variasi CV sebesar 3,97%. Penurunan tersebut terjadi meskipun produksi beras pada tahun 2024 di Provinsi NTB turun menjadi 827,79 ribu ton dari 876,27 ribu ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga lebih dipengaruhi oleh perbaikan pasokan nasional dibandingkan produksi beras lokal. Pada tahun ini, impor beras meningkat menjadi 4.381.671 ton, sehingga memperkuat ketersediaan beras nasional yang dapat meredam tekanan harga hingga ke tingkat daerah. Selain daripada itu, realisasi CBPD Provinsi NTB meningkat menjadi 104,40, meskipun secara proporsional masih terbatas terhadap skala produksi. Namun, CBPD di 10 Kabupaten/kota di Provinsi NTB juga terus diperkuat. Kondisi yang terjadi sejalan dengan Minot (2014), menegaskan bahwa dalam pasar yang terintegrasi, maka perbaikan pasokan pada tingkat nasional akan ditransmisikan ke pasar regional sehingga menurunkan volatilitas harga domestik.

Tren positif tersebut terus berlanjut di tahun 2025, kedua jenis beras berada pada kategori ringan. Volatilitas harga beras premium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 3,38% dan harga beras medium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 2,52%, yang merupakan nilai CV yang sangat rendah dibandingkan dengan batas kriteria stabil < 10%. sehingga pada tahun ini harga beras di NTB fluktuasinya rendah. Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi beras di Provinsi NTB menjadi 973,14 ribu ton, menurunnya kebutuhan CBPD, diperkuatnya realisasi CBPD Provinsi NTB sebesar 82,48 ton, dan realisasi CBPD di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB guna dapat memperkuat sisi pasokan dan kapasitas intervensi daerah. Selain itu, berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa impor beras nasional tahun 2025 turun menjadi 514.804 ribu ton karena produksi beras nasional tahun tersebut mencapai 34.690.959 ton atau meningkat sebesar 13,29% dibandingkan tahun 2024, sehingga pemerintah mengklaim telah tercapai swasembada beras. Hal ini berarti, ketersediaan pangan secara nasional dan kemampuan pemerintah dan pasar untuk mendistribusikannya dari daerah surplus ke defisit cukup baik. Kondisi ini sejalan dengan teori Gilbert dan Morgan (2010), menyatakan bahwa

volatilitas harga yang rendah mencerminkan berkurangnya risiko pasar dan membaiknya fundamental pasokan dalam sistem pangan.

Perbandingan Volatilitas Harga Beras di Provinsi NTB dan Provinsi Pembanding

Pemilihan provinsi pembanding dalam penelitian ini adalah metodologis penting yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana dinamika harga antarwilayah dengan karakteristik ekonomi, neraca pangan, dan peran pasar yang berbeda. Literatur ekonomi pangan menegaskan bahwa analisis perbandingan antarwilayah dapat mengungkap perbedaan struktural dalam volatilitas harga yang disebabkan oleh faktor produksi, permintaan distribusi, dan integrasi pasar. Adanya hal tersebut, sehingga memberikan konteks yang lebih luas terhadap interpretasi stabilitas harga. Studi volatilitas harga pangan menunjukkan bahwa faktor-faktor makro dan struktural berperan berbeda antar wilayah, sehingga perbandingan regional memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap volatilitas yang terjadi secara lokal dan nasional (Putra *et al.* 2021).

Sebagai provinsi tetangga di sebelah timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai pembanding karena merupakan wilayah defisit beras yang sangat bergantung pada pasokan antar provinsi. Ketergantungan ini menyebabkan harga beras di Provinsi NTT diperkirakan lebih sensitif terhadap gangguan distribusi dan perubahan pasokan nasional. Struktur pasar yang rentan tersebut menjadikan Provinsi NTT relevan sebagai pembanding untuk melihat apakah volatilitas harga di Provinsi NTB hanya bersifat struktural di kawasan timur Indonesia (Herin, 2025).

Provinsi Jawa Timur sebagai pembanding kedua karena berperan penting sebagai salah satu pusat ekonomi nasional, sentra produksi padi terbesar, dan wilayah surplus beras nasional serta pusat distribusi utama beras dari Pulau Jawa ke wilayah Indonesia bagian timur. Dengan karakteristik tersebut, dinamika harga beras di provinsi ini dapat berfungsi sebagai referensi regional. Dalam hal ini, perbandingan di Provinsi Jawa Timur memungkinkan analisis perbedaan volatilitas antara wilayah surplus dan non surplus dalam memahami dinamika stabilitas harga beras di Provinsi NTB (Wati *et al.* 2017).

Provinsi Jakarta dipilih sebagai pembanding karena berperan sebagai pusat ekonomi nasional dan keterkaitan kuat dengan pasar regional. Dinamika harga beras di Provinsi Jakarta sering dijadikan indikator inflasi pangan dan referensi kebijakan makro karena sensitivitasnya terhadap perubahan pasokan dan intervensi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa perubahan harga dan persediaan beras di Provinsi Jakarta berpengaruh signifikan terhadap inflasi tingkat nasional, sehingga relevan digunakan sebagai tolak ukur dalam analisis volatilitas harga beras (Farizi dan Kornitasari, 2023).

Pemilihan Provinsi NTT, Jawa Timur, dan Jakarta menggambarkan variasi struktur pasar beras di Indonesia dari sisi wilayah defisit dan surplus maupun perbedaan peran ekonomi regional dan nasional. Maka melalui perbandingan tersebut, kondisi volatilitas harga beras di Provinsi NTB dapat dianalisis secara lebih kontekstual sehingga menunjukkan bagaimana interaksi faktor lokal dan nasional mempengaruhi dinamika harga harian. Berikut *Coefficient of*

Variation (CV) Harga Beras premium dan medium di Provinsi NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jakarta dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 *Coefficient of Variation* (CV) harga beras premium dan medium di NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jakarta pada tahun 2023-2025 (%)

Volatilitas harga beras di provinsi NTB dan provinsi pembanding pada tahun 2023-2025 yang disajikan dalam pada Gambar 1 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-ke-tahun dengan menggambarkan stabilisasi harga yang semakin baik. Pada tahun 2023, harga beras premium di Provinsi NTB menunjukkan fluktuasi tinggi dengan nilai koefisien variasi CV sebesar 9,41% dan harga beras medium juga berfluktuasi tinggi dengan nilai CV sebesar 8,32%, namun keduanya termasuk ke dalam kondisi stabil sesuai dengan kriteria Badan Ketahanan Pangan (2021), yaitu di bawah 10%. Volatilitas ini lebih tinggi dibandingkan di Provinsi NTT, Jawa Timur, dan Jakarta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Provinsi NTB merupakan daerah surplus produksi beras, namun masih rentan terhadap fluktuasi harga yang dapat diakibatkan oleh permasalahan distribusi dan perdagangan antar wilayah.

Dari sisi lain, Provinsi NTT sebagai daerah defisit menunjukkan tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi pasokan beras nasional. Sementara itu, Jawa Timur (provinsi surplus beras) dan Jakarta (provinsi yang mendatangkan sebagian besar kebutuhan berasnya dari luar provinsi) memiliki nilai CV untuk harga beras yang rendah dan masuk kategori stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga dicapai apabila ketersediaan pasokan terjamin, baik bersumber dari produksi di daerah itu sendiri, maupun dari perdagangan antar wilayah, serta ditunjang oleh kebijakan harga yang didukung dengan pengelolaan CBPD. Temuan tersebut sejalan hasil temuan Putra *et al.* (2021), bahwa volatilitas harga beras dipengaruhi oleh kombinasi faktor lokal dan nasional seperti struktur pasar, kondisi produksi, dan kebijakan harga beras di berbagai wilayah.

Pada tahun 2024, volatilitas harga beras di seluruh provinsi penelitian menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Di Provinsi NTB, nilai volatilitas beras premium dan medium pada kategori ringan dengan nilai CV sebesar 4,26% dan 3,08%. Penurunan ini juga terjadi di Provinsi NTT, untuk beras premium nilai CV sebesar 3,21% dan beras medium nilai CV sebesar 5,06%, walaupun nilai CV beras medium di Provinsi NTT masih pada kategori tinggi dibandingkan provinsi NTB. Sementara itu, di Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan tingkat volatilitas yang terendah dibandingkan tiga provinsi lainnya. Sedangkan di Jakarta, volatilitas harga beras premium masih relatif lebih tinggi dibandingkan di Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan temuan Gouel (2013), menegaskan bahwa intervensi pemerintah melalui pengelolaan cadangan dan kebijakan pasar domestik merupakan instrumen penting dalam merespons gejolak harga pangan di negara berkembang, meskipun dampaknya bergantung pada desain kebijakan dan konteks implementasinya.

Tren volatilitas harga beras pada tahun 2025 menunjukkan penurunan yang semakin kuat di seluruh provinsi. Di Provinsi NTB, volatilitas harga beras premium dan medium masing-masing berada pada kategori ringan dengan nilai CV sebesar 1,32% dan 1,51%. Hal tersebut juga terjadi di provinsi acuan lainnya, meskipun nilai CV yang dimiliki menunjukkan variasi antar wilayah. Namun demikian, volatilitas harga beras premium dan medium secara umum telah berada pada kategori ringan atau di bawah 2%, jauh lebih rendah dari kriteria CV stabil <10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi sistem pasar beras semakin stabil dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Dengan demikian, penurunan volatilitas tersebut menunjukkan bahwa semakin kuatnya stabilisasi pasar beras dan perbaikan integrasi distribusi antar wilayah dengan dipengaruhi oleh produksi beras yang semakin tinggi, terutama peningkatan produksi beras di Provinsi NTB. Hal ini pun sejalan dengan dicapainya pada tahun ini swasembada beras secara nasional, seperti diumumkan oleh Menteri Pertanian (Ulya dan Belarminus 2025).

KESIMPULAN

Realisasi kinerja CBPD di Provinsi NTB belum memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025. Namun, pemanfaatan tetap dilakukan sesuai amanat regulasi daerah masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Volatilitas harga beras di Provinsi NTB pada tahun 2023-2025, menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan pada harga beras premium dan medium. Sementara perbandingan volatilitas harga beras di Provinsi NTB dan provinsi pembanding selama tahun 2023-2025, juga menunjukkan penurunan yang signifikan pada harga beras premium dan medium, dan berada pada tingkat stabil berdasarkan kriteria Bapanas (<10%).

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan perlunya penguatan komitmen pemerintah daerah NTB, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kapasitas CBPD sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025. Pemerintah provinsi NTB juga perlu menjaga keberlanjutan tingkat volatilitas harga beras yang rendah melalui peningkatan volume CBPD, pengelolaan CBPD berupa

distribusi beras tepat waktu dalam menangani terjadinya gejolak harga dan kerawanan pangan dampak bencana, dan memfasilitasi melalui peraturan daerah untuk kelancaran distribusi dan perdagangan beras antar daerah kabupaten/kota dari daerah surplus ke daerah minus serta perdagangan antar daerah. Selanjutnya kepada pemerintah provinsi di wilayah pembanding, disarankan untuk ikut menjaga keberlangsungan stabilisasi harga beras yang telah dicapai dalam tiga tahun terakhir melalui peningkatan produksi, pengelolaan CBPD, dan memperlancar perdagangan pangan intra dan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapanas. 2025. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Bapanas. 2025. Panel Harga Panen Pangan. Badan Pangan Nasional. Diakses di: <https://panelharga.badanpangan.go.id/beranda>
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2026. Luas Panen dan Produksi Padi Nusa Tenggara Barat 2025 (Angkas Sementara, Hasil Amatan KSA September 2025). Mataram: BPS Provinsi NTB.
- Dalheimer B, Foster K, Shively G, Pede VO, Fiankor D-DD, Ricker-Gilbert J, Bist P. 2026. Stocks and shocks: Assessing the relative roles of public and private inventories in buffering rice price volatility in the Philippines. *Food Policy*. 139:103052.doi:10.1016/j.foodpol.2026.103052.
- Farizi RR, Kornitasari Y. 2023. Analisis Pengaruh Jumlah Persediaan Beras dan Harga Beras Terhadap Pembentukan Inflasi di Provinsi Dki Jakarta. *J. Dev. Econ. Soc. Stud.* 2(2):386–403.doi:10.21776/jdess.2023.02.2.14.
- Gouel C. 2013. Food Price Volatility and Domestic Stabilization Policies in Developing Countries. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.hlm 50.
- Herin FP. 2025. NTT Defisit Beras 200.000 Ton, Bagaimana Mengatasinya? *Kompas.id*. (Artikel web). Diakses di: <https://www.kompas.id/artikel/ntt-defisit-beras-200000-ton-bagaimana-mengatasinya>
- Huchet-Bourdon M. 2011. Agricultural Commodity Price Volatility: An Overview. Volume ke-52. Paris OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers Report No.: 52.hlm 1–52.
- Fika Nurul Ulya, Robertus Belarminus. 2025. Mentan Klaim Swasembada Beras Tercapai pada Akhir Tahun 2025. *Kompas.com*. Diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/20/19361661/mentan-klaim-swasembada-beras-tercapai-pada-akhir-tahun-2025>
- Minot N. 2014. Food price volatility in sub-Saharan Africa: Has it really increased? *Food Policy*. 45:45–56.doi:10.1016/j.foodpol.2013.12.008.
- Muslim A. 2015. Rice Price Volatility and Its Implication to Food Security in Indonesia. *Int. J. Appl. Bus. Econ. Res. IJABER*. 13(7):4887–4905.
- NTB Satu Data. 2025. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota. Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Putra AW, Supriatna J, Koestoer RH, Soesilo TEB. 2021. Differences in Local Rice Price Volatility, Climate, and Macroeconomic Determinants in the Indonesian Market. *Sustainability*. 13(8):4465.doi:10.3390/su13084465.
- [PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2021. Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Date: 2021. Report No.: PSEKP/2020/4992.001.101.I.D.
- Suryana A. 2008. Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. *Pengemb. Inov. Pertan.* 1(1):1–16.
- Suryana A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelit. Agro Ekon.* 32(2):123.doi:10.21082/fae.v32n2.2014.123-135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2012. Pemerintah Republik Indonesia.
- Utami Dwi A, Harianto, Apriande C, Gita Dewi T. 2023. Reformulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Cadangan Pangan Indonesia. *Policy Brief Pertan. Kelaut. Dan Biosains Trop.* 5(2).doi:10.29244/Agro-Maritim.050216.
- Wati RYE, Anindita R, Setiawan B. 2017. Rice Price Volatility in East Java. *Russ. J. Agric. Socio-Econ. Sci.* 69(9):253–261.doi:10.18551/rjoas.2017-09.32.
- Wright BD. 2011. The Economics of Grain Price Volatility. *Appl. Econ. Perspect. Policy.* 33(1):32–58.doi:10.1093/aep/ppq033.